

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DI KABUPATEN SUMEDANG

Irma Dewi Agustin^{*1}, Akadun², Vina Apriani³, Iqbal Abdurrohman⁴, Willy Alfadilah⁵, Dewi Mutiasari⁶
^{1,2,3,4,5,6}Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Maret 12, 2024

Revised April 10, 2024

Accepted Mei 30, 2024

Keywords:

Public Policy
Implementation of Public
Policy
Irrigation Network
Development

ABSTRACT

This research aims to find out, get objective data and information about the implementation of irrigation network development programs in Pasanggrahan Village of the Sumedang District Office of Public Works and Spatial Planning. The methods used in this study are qualitative research methods with data collection, observation steps, in-depth interviews and documentation. From this research obtained obstacles regarding the implementation of irrigation network development program in Pasanggrahan Village, Public Works Office and Spatial Arrangement of Sumedang Regency, namely lack of support from the community for irrigation development, poor geographical conditions, lack of support from various parties to the construction of irrigation networks. Efforts to overcome obstacles include increasing socialization to the community about the construction of irrigation networks, making observations to the field first, socializing to the parties concerned around the Sumedang Regency.



Copyright © 2023 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Irma Dewi Agustin
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas April
Email: irma_dewi@unsap.ac.id

1. INTRODUCTION

Irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan usaha tani dalam arti luas. Sejalan dengan era reformasi dan otonomi daerah, maka saat ini telah ada pengaturan baru yang mengatur tentang irigasi yaitu pengelolaan diserahkan kepada petani. Namun demikian pemerintah tetap berkewajiban untuk membantu petani terutama dalam bimbingan teknis dan keuangan sampai mampu mengelolanya secara mandiri. Irigasi di definisikan sebagai suatu cara pemberian air, baik secara alamiah ataupun buatan kepada tanah dengan tujuan untuk memberi kelembaban yang berguna bagi pertumbuhan tanaman.

Alasan utama yang muncul perubahan kebijakan tersebut adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah. Namun jika dikaji lebih dalam, perubahan tersebut juga tidak terlepas dari perubahan model kebijakan irigasi pada tingkat internasional. Dominasi pemerintah dalam pembangunan irigasi pada masa revolusi hijau dipandang sebagai penyebab utama kegagalan pembangunan irigasi termasuk di Indonesia. Salah satu dari kegagalan tersebut adalah ekspansi besar-besaran daerah irigasi yang tidak diimbangi dengan ketersediaan dana untuk melakukan operasional dan pembangunan jaringan irigasi.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor organisasi, prosedur, teknik, dan sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumedang merupakan instansi yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur penduduk kabupaten Sumedang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka, dibutuhkan sistem yang baik dan terintegrasi dalam melakukan proses pembangunan berdasarkan sistem yang telah ada sebelumnya. Adapun faktor infrastruktur menjadi salah satu hambatan pemerintah dalam mengimplementasikan pelayanan administrasi kependudukan, seperti tempat tinggalnya jauh, terpencil, sulit dihubungi karena ada daerah pengunungan dan sulit mendapatkan jaringan yang memadai.

Dengan demikian pemindahan tanggung jawab operasional dan pembangunan jaringan dari pemerintah kepada petani (P3A) dipandang sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor irigasi. Konsep inilah yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia di sektor irigasi atau yang lebih dikenal sebagai Irrigation Management Transfer (IMT), yang menempatkan P3A sebagai aktor utama dalam operasional dan pembangunan jaringan irigasi.

Irigasi pada umumnya adalah usaha untuk mendatangkan air dengan membuat bangunan-bangunan dan saluran-saluran untuk mengalirkan air guna keperluan petani, membagi-bagikan air kesawah-sawah atau ladang-ladang dengan cara yang teratur dan membuang air yang tidak diperlukannya lagi, setelah air itu diperlukan dengan sebaik-baiknya.

Tidak sedikit orang yang berada di desa Pasanggrahan yang merasa keberatan akan adanya pembangunan irigasi ini, selain ada kelebihan ada juga kekurangan yang dirasakan masyarakat untuk pembangunan irigasi ini, terdapat beberapa penghambat dari kebijakan pembangunan irigasi ini, keadaan geografis yang tidak strategis akan pembangunan irigasi ini juga akan menghambat terjadinya pembangunan, dilihat dari sumber daya manusia banyak hal yang kurang untuk kedepannya yaitu kurangnya kompetensi sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya manusia.

Pertanian atau area perkebunan di desa Pasanggrahan dengan terbangunnya saluran irigasi, diyakini akan memudahkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk pertumbuhan tanaman padi. Keberadaan irigasinya akan bermanfaat untuk pengairan sawah seluas ± 10 hektare. Ada kemungkinan jika suplai air lancar yang tadinya petani mengolah sawah hanya dua musim kini bisa dilakukan tiga musim dalam satu tahun. Panjang irigasi nya $\pm$ mencapai panjang 100 meter.

Berdasarkan hasil observasi awal Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, peneliti menemukan beberapa indikasi masalah dalam implementasi kebijakan program pembangunan irigasi kabupaten Sumedang. Adapun indikasi-indikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap pembangunan irigasi, sehingga mengakibatkan terhambatnya pembangunan.
Contohnya : Tidak 100% masyarakat mendukung adanya pembangunan jaringan irigasi tersebut, ada masyarakat yang menyerahkan lahannya untuk pembangunan jaringan irigasi ada juga yang tidak. Mungkin, hanya 70% masyarakat menyetujui proses pembangunan jaringan irigasi 30% yang tidak menyetujui.
2. Kondisi geografis yang kurang baik yang menjadi kendala dalam pembangunan irigasi. Contohnya : kondisi geografisnya di desa pasanggrahan tidak merata sehingga ada kendala untuk proses pembangunan irigasi.
3. Kurangnya dukungan dari berbagai pihak terhadap pembangunan jaringan irigasi. Contohnya : Pihak desa, pemerintah.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka peneliti menyusun fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Pembangunan Jaringan Irigasi Di Kabupaten Sumedang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam kebijakan Pembangunan Jaringan Irigasi di Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan kebijakan Pembangunan Jaringan Irigasi di Kabupaten Sumedang?

2. METHOD

Peneliti berfokus dari realitas yang terjadi di lapangan, yaitu Implementasi Program Pembangunan Jaringan Irigasi di Kabupaten sumedang, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi deskriptif.

Definisi yang diungkapkan Sugiyono seperti yang dikutip dari buku yang berjudul Memahami Penelitian Kualitatif, menyatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi data (gabungan), analisis data bersifat induktif, penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi” (Sugiyono, 2017).

Maka penelitian kualitatif selalu mengharapkan adanya sebuah kegiatan proses berpikir induktif untuk memahami realitas, peneliti terlibat langsung dalam latar belakang fenomena dan situasi yang diteliti dan memusatkan perhatian pada suatu peristiwa kehidupan sesuai dengan konteks penelitian.

Dalam melaksanakan penelitian, setiap kegiatan pengumpulan data selalu berhadapan dengan objek yang akan diteliti, baik berupa manusia, benda, maupun aktivitas-aktivitas atau kejadian-kejadian dimana suatu masalah dapat untuk keseluruhan karakteristik objek. Penelitian ini disebut objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tapi oleh Spradey (dalam Sugiyono, 2013:215) dinamakan “*Social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : Tempat (*Place*), Pelaku (*Actors*) dan Aktivitas (*Activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pembangunan Jaringan Irigasi, Staff Bagian Program dan Sasaran/masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang.

Tabel 1. Penentuan Sasaran

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Bidang Sumber Daya Air	1
2	Kepala Seksi perencanaan Sumber Daya Air	1
3	Kepala Seksi Pelaksanaan	1
4	Kepala Seksi Pemeliharaan	1
	Jumlah	4

Untuk menunjang metode yang digunakan guna memperoleh informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017) terdiri dari Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Sedangkan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini biasanya selesai setelah dianggap permanen. Implementasi ini tidak hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Pengertian implementasi kebijakan secara sederhana dirumuskan oleh Wahab dalam Anggara (2012) mengatakan bahwa “implementasi sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden”.

Untuk mengetahui implementasi program pembangunan jaringan irigasi di Kabupaten Sumedang dapat dilihat dari empat dimensi, seperti yang dikemukakan Rondineli dan Cheema dalam Nugroho (2021) yaitu sebagai berikut :

- a. Kondisi lingkungan
- b. Hubungan antar organisasi
- c. Sumber daya
- d. Karakter institusi implementor

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi diketahui kondisi implementasi program pembangunan jaringan irigasi di Kabupaten Sumedang sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi Implementasi Program Pembangunan Jaringan Irigasi di Kabupaten Sumedang

No	Dimensi	Hasil Penelitian
1	Kondisi Lingkungan	Kondisi geografis di Kabupaten Sumedang merupakan lahan berbukit dan daerah persawahan sehingga jaringan irigasi dapat dibangun di kawasan tersebut. Pembangunan jaringan irigasi tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial di sekitar wilayah pembangunan. Kondisi sosial pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Kondisi sosial juga bisa dilihat dari tingkat kemiskinannya. Selain itu, kondisi ekonomi di Kabupaten Sumedang sudah sangat baik untuk diadakannya pembangunan irigasi tersebut. Kondisi ekonomi seperti dukungan pendanaan rehab sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan bisa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2	Hubungan antar Organisasi	Koordinasi yang terjalin antara Dinas PUPR dan Penataan Ruang dengan pemerintah desa sangat baik khususnya dalam melaksanakan pembangunan jaringan irigasi di Kabupaten Sumedang. Koordinasi dilakukan agar mempermudah proses pembangunan jaringan irigasi.
3	Sumber Data	Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat di dalam pembangunan jaringan irigasi memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan pekerjaannya. Kinerja yang mereka hasilkan selama ini mampu bekerja sesuai dengan target dan tugas yang diberikan. Di dalam penentuan SDM yang terlibat di pembangunan jaringan irigasi ditentukan dengan proses seleksi agar pekerja yang bekerja dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Dana atau anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi di Kabupaten Sumedang mencapai milyar rupiah. Dana atau anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan jaringan irigasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian anggaran tersebut di alokasikan ke Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan akan diberikan dan dikelola oleh Bidang Bina Marga Dinas PUPR di tiap-tiap kota di setiap provinsi untuk pembangunan jaringan irigasi.
4	Karakteristik Institusi Implementor	Dalam pembagian kerja dibantu oleh seksi pembangunan. Seksi pembangunan melakukan perencanaan, menyusun, dan melaksanakan kegiatan dengan pembagian kerja agar tugas dapat terselesaikan dengan baik. Program pembangunan jaringan irigasi telah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Dinas PUPR Kabupaten Sumedang. SOP tertuang di dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 23 Tahun 2013.

Sumber: Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa implementasi program pembanguan jaringan irigasi di Kabupaten Sumedang telah berjalan dengan baik. Pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi di beberapa tempat berjalan dengan sebagaimana mestinya yang menjadi alas implementasinya, yakni tertib administrasi, administratif, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan. Sejak program pemerintah ini di terapkan dalam bentuk sosial tidak selalu mengalami kendala sepenuhnya selalu terealisasi atau terpenuhi, ada beberapa kelompok tani mendapat bantuan akibat penjatahan atau dengan kata lain pembagian dengan kelompok tani pemakai air yang lain yang juga membutuhkan, para petani asih bnyak yang mengeluh dikarenakan debit air yang tidak merata yang masuk ke area sawah mereka, maka dari itu dengan adanya program pembangunan jaringan irigasi para masyarakat bisa mendukung.

Di dalam melaksanakan poembangunan jaringan irigasi Kabupaten Sumedang tentunya tidak selalu berjalan lancar terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemnbangunan tersebut. Ada faktor keterbatasan sumber daya finansial yaitu penghambat utama dalam pengembangan irigasi kecil secara individu/privat. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah pengusahaan irigasi kecil melalui investasi yang dilakukan secara kelompok, mengingat semakin terbatasnya program bantuan dari pemerintah. Selain itu, pengembangan jaringan irigasi kecil juga dapat ditempuh melalui bantuan dari pemerintah untuk dana investasi. Oleh karena itu untuk menghadapi dampak ekstrim tersebut diperlukan program pembangunan irigasi yang sistematis agar irigasi dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat memberikan keuntungan khususnya bagi petani. Selama ini, kebijakan pembangunan di Indonesia terutama pembangunan Desa dalam melaksanakan program pembangunan selalu bersipat top down dan sektoral dalam pembangunan serta implementasinya tidak terintegrasi, hal ini dapat dilihat dari program pemerintah pusat (setiap departemen) yang bersifat sektoral pembangunan disusun tanpa melibatkan sektor yang lain serta pemerintah daerah, hal lain yang menjadi permasalahan adalah tidak dicermatinya persoalan mendasar yang terjadi di daerah, sehingga formulasi strategi dan program menjadi tidak tepat.

Persoalan ketidak jelasan kewenangan yang ada di Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional menyebabkan terdapatnya berbagai kesulitan dalam menyusun dan mengimplementasi kebijakan Pemerintah Provinsi terhadap upaya Pembangunan jaringan irigasi. Salah satu Daerah Irigasi yang merupakan irigasi teknis, dimana efisiensi sangat di utamakan adalah Daerah Irigasi (DI) . Berkaitan dengan usaha meningkatkan produksi pertanian, saat ini perlu dilakukan suatu penelitian atau percobaan-percobaan untuk mengetahui kondisi dan keadaan saluran irigasi, mengurangi potensi kehilangan air irigasi dan memafaatkan air secara lebih efisien sehingga di dapat hasil yang bisa dijadikan sebagai evaluasi dalam pengelolaan air irigasi. Dalam melakukan sasaran pada konstruksi/bangunan fisik secara detail yang sesuai dengan kriteria desain suatu bangunan air yang efisien dari segi teknis dan biaya serta pengembangan daerah irigasi yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah irigasi, dan perhitungan dari segi ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat dilakukan pembangunan daerah Irigasi. Setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah tentu mempunyai tujuan untuk mensejahterakan dan memajukan masyarakat, namun dalam pembangunan irigasi tentu membutuhkan proses dan waktu yang tidak sebentar karena melewati berbagai tahapan, rintangan dan masalah, begitu juga dengan proses pembangunan irigasi.

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu tersebut berada. Hambatan dalam sosialisasi program pembangunan irigasi yaitu berasal dari masyarakat yang belum paham dan mengerti akan pentingnya irigasi, masyarakat berpikir dengan adanya irigasi akan mempersulit dalam perekonomian justru bukan malahan membantu, aspek masyarakat nya aja yang kurang pengetahuan. Hambatan dalam pembagian tugas yaitu tumpang tindihnya pekerjaan, jadi pekerjaan yang sama dilakukan oleh beberapa orang ini akan menghambat dalam pembangunan. Pembagian tugas mutlak diperlukan, dengan adanya pembagian tugas yang jelas setiap anggota tim memiliki arahan atau petunjuk tentang apa yang harus dikerjakannya. sebab tanpa adanya pembagian kerja mereka akan bekerja menurut kemauan sendiri-sendiri tanpa menghiraukan tujuan organisasi atau perusahaan secara keseluruhan yang berakibat tidak tercapainya tujuan organisasi atau paling tidak tujuan organisasi akan terhambat pencapaiannya.

Upaya dalam mengatasi kebijakan pembangunan jaringan irigasi menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan memperhatikan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu, dengan adanya program pembangunan jaringan irigasi akan meningkatkan peran dan kemandirian petani baik sebagai individu maupun sebagai kelompok yang berupa Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai, dalam pengelolaan jaringan irigasi dengan memperjelas wewenang, tugas, dan tanggung jawab masing-masing lembaga pengelola jaringan irigasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Juga dapat bermanfaat pada peningkatan produktivitas lahan pertanian, meningkatkan hasil panen, dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

4. CONCLUSION

Pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi di beberapa tempat berjalan dengan sebagaimana mestinya yang menjadi alas implementasinya, yakni tertib administrasi, administratif, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan. Ada faktor keterbatasan sumber daya finansial yaitu penghambat utama dalam pengembangan irigasi kecil secara individu/privat. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah pengusahaan irigasi kecil melalui investasi yang dilakukan secara kelompok, mengingat semakin terbatasnya program bantuan dari pemerintah. Selain itu, pengembangan jaringan irigasi kecil juga dapat ditempuh melalui bantuan dari pemerintah untuk dana investasi. Oleh karena itu untuk menghadapi dampak ekstrim tersebut diperlukan program pembangunan irigasi yang sistematis agar irigasi dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat memberikan keuntungan khususnya bagi petani. Upaya dalam mengatasi kebijakan pembangunan jaringan irigasi menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan memperhatikan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Sejak program pemerintah ini di terapkan dalam bentuk sosial tidak selalu mengalami kendala sepenuhnya selalu terealisasi atau terpenuhi, ada beberapa kelompok tani mendapat bantuan akibat penjatahan atau dengan kata lain pembagian dengan kelompok tani pemakai air yang lain yang juga membutuhkan, para petani masih banyak yang mngeluh dikarnakan debit air yang tdk merata yang masuk ke areal sawa mereka, maka dari itu dengan adanya program pembangunan jaringan irigasi para masyarakat bisa mendukung.

REFERENCES

- Akadun. 2002. *Pemberdayaan Birokrasi Pemerintah*. Bandung: CV Maulana
- Atmosudirjo. S. Prajudi. 1982. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fahmi. Irham. 2013. *Perilaku Organisasi: Teori, aplikasi Dan Kasus*. Bandung: Alfabeta.
- Gie, The Liang. 1997. *Ilmu Administrasi: Pengertian, Kedudukan dan Perincian*. Yogyakarta: Yayasan Studi Ilmu Administrasi.
- Handyaningrat, Soewarno. 1984. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ibrahim, Amin. 2007. *Pokok-pokok Administrasi Publik & Implementasinya*. Bandung: Aditama.
- Keban. Yermias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Isu*. Gava Media, Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2021. *Menuju Kebijakan Publik Unggul*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Siagian, S.P. 2014. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulbert. 2013. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. 2017. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Thoha, Miftah. 2002. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Yogyakarta: UGM.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Gafindo Perasada.